

## PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PEMBUKAAN TANAH OLEH WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KUTAI KARTANEGARA

Retno Ayu Wijayanti<sup>1</sup> Sulastriyono<sup>2</sup>

### Intisari

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk Mengetahui dan menganalisis praktik pembukaan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara, serta kendala yang dihadapi saat pembukaan lahan dan upaya penyelesaian masalah pembukaan lahan serta Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi warga masyarakat hukum adat di Kutai Kartanegara ketika mendaftarkan tanah guna memperoleh hak milik atas tanah tersebut dan upaya penyelesaiannya.

Jenis penelitian ini adalah *juridis empiris* dengan sifatnya deskriptif, data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka sedangkan data primer melalui wawancara. subjek penelitian terdiri dari 4 responden dan 3 narasumber dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Warga masyarakat Kutai Kartanegara, umumnya dan sebagian besar menggunakan cara tebas bakar, selanjutnya setelah membuka tanah warga masyarakat memanfaatkan tanah tersebut untuk Berladang, Ladang berpindah dan Tanah Garap Terus menerus (kepemilikan Kebun). Kendala yang dihadapi secara internal ialah saling klaim lahan antar warga masyarakat hukum Adat di Kutai Kartanegara dan kendala Eksternal terkait pemetaan lahan transmigrasi dan lahan konservasi hutan yang tidak jelas batas-batasnya. Upaya yang dapat dilakukan secara internal yakni penyelesaian secara musyawarah oleh sesama warga yang bersengketa dan secara eksternal pemerintah belum menetapkan batas-batas yang jelas. Permasalahan kedua, Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat pada saat pendaftaran tanah garapan milik warga diklaim bahwa tanah tersebut merupakan lahan transmigrasi dan lahan konservasi hutan sehingga tidak dapat didaftarkan dan Upaya yang dilakukan warga untuk dapat mendaftarkan tanahnya tersebut yakni dengan berkonsultasi dengan BPN dan meminta pihak BPN untuk menunjukkan batas-batas yang pasti agar masyarakat mengetahui dan tidak membuka lahan pada lahan transmigrasi dan lahan konservasi hutan.

**Kata Kunci : Pembukaan Tanah, Masyarakat Hukum Adat, Kutai Kartanegara.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen dan Wakil Dekan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## LAND TITLE ACQUISITION THROUGH LAND OPENING BY ADAT LAW SOCIETY PEOPLE IN KUTAI KARTANEGARA

Retno Ayu Wijayanti<sup>1</sup> Sulastriyono<sup>2</sup>

### Abstract

Objective of this research is to identify and analyze land opening practice done by adat law society people in Kutai Kartanegara, and obstacle face in opening land and effort to deal with land opening and to identify obstacle the people face in registering land to acquire land title and effort to solve it.

This type of research is juridical empirical descriptive nature, the data collected consist of secondary data and primary data. Secondary data collection is done with literature while primary data through interviews. research subjects consisted of 4 respondents and 3 sources by using purposive sampling techniques with qualitative data analysis.

The results indicated that Kutai Kartanegara people use cut and burn to open land, and use the land for dry farming, sifting cultivation and continuous cultivation (yard ownership). Obstacle faced by internally is another land claim between residents of indigenous people in Kutai and external obstacle associated mapping transmigration land and forest conservation lands that are not clearly the marcated. Efforts which can be internally the settlement amicably by fellow citizens to the dispute and externally government has not set clear boundaries. The second problem, the obstacle faced by the customary law community at the time of registration of land plots owned by residents claimit that the land is the land for resettlement and land conservation in the forest so it can not be registred and the effort made to be able to register the land that is in consultation with BPN and requesting party BPN to show the exact boundaries so that people know and do not open the land to the land resettlemen and land forest conservation.

Keywords: Land opening, Adat law society, Kutai Kartanegara

---

<sup>1</sup> Student of Master of Notary Program, Faculty of Law, Gadjah Mada University

<sup>2</sup> Lecturer and Deputy Dean, Faculty of Law, Gadjah Mada University